UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Yuridis Pelibatan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dalam Proses Pewarganegaraan Pemain Sepak Bola Asing melalui Jalur Naturalisasi Istimewa dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara
Muhammad Fathur Rizqi, Dr. Oce Madril, S.H., M.A.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam konstruksi negara kesejahteraan, negara hadir untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya.[5] Untuk mewujudkan hal tersebut, tiap-tiap negara wajib rekognisi dan menentukan siapa dan bagaimana subjek tersebut dapat diakui sebagai warga negara. Karena itu, berbagai negara melakukan berbagai langkah dalam merekognisi tiap-tiap individu sebagai warga negara yang didasarkan pada faktor, sejarah, identitas, bahasa, kebudayaan, teritorial, dan lain sebagainya. Pada umumnya, penentuan status kewarganegaraan seseorang pada suatu negara didasarkan pada dua asas utama, yakni asas *ius sanguinis* (*law of the bloods*) yang mengacu pada garis keturunan dan *ius soli* (*law of the soil*) yang menentukan kewarganegaraan seseorang didasarkan pada tempat lahir.[6] Meskipun demikian, saat ini, penentuan kewarganegaraan seseorang tidak terbatas pada 2 (dua) asas tersebut, tetapi juga dapat didasarkan pada kepentingan negara seiring berkembangnya globalisasi.

Di era globalisasi, kebijakan kewarganegaraan menjadi lebih dinamis dan berkembang. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh semakin tingginya mobilitas individu akibat tuntutan ekonomi dan perkembangan zaman sehingga sebagian negara mulai melonggarkan kebijakan kewarganegaraan atas dasar kepentingan tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan hubungan bilateral, serta

[5] Laoh, Renais, "*Perlindungan Hukum Hak Anak Untuk Memperoleh Kewarganegaraan dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*", Lex Privatum 6, No. 8, 2018, hlm. 139.
[6] Dewansyah, Bilal, "*Indonesian Diaspora Movement and Citizenship Law Reform: Towards 'semi-Dual Citizenship'*", Diaspora Studies 12, No. 1, 2019, hlm. 54.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Yuridis Pelibatan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dalam Proses Pewarganegaraan Pemain Sepak
Bola Asing melalui Jalur Naturalisasi Istimewa dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara**
Muhammad Fathur Rizqi, Dr. Oce Madril, S.H., M.A.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

penghormatan sebagai tanda jasa terhadap individu pada suatu negara. Kebijakan tersebut dianggap sebagai langkah progresif suatu negara untuk menarik kembali diaspora dan/atau warga negara asing agar dapat berkontribusi terhadap pembangunan dan kepentingan nasional. Sementara itu, fleksibilitas terhadap kebijakan kewarganegaraan dianggap sebagai langkah yang strategis dalam menghadapi tantangan global dengan memanfaatkan potensi individu dari berbagai wilayah demi mewujudkan kepentingan nasional.

Salah satu contoh pemanfaatan dari adanya fleksibilitas kebijakan pewarganegaraan adalah program naturalisasi terhadap pemain sepak bola asing yang ditujukan untuk meningkatkan performa tim nasional (timnas) olahraga suatu negara. Salah satu negara yang telah berhasil memanfaatkan potensi pemain asing melalui program naturalisasi adalah negara Prancis. Negara tersebut telah melakukan naturalisasi terhadap pemain imigran yang berasal dari Benua Afrika, seperti N'golo Kante, Benjamin Mendy, Paul Pogba, Presnel Kimpembe, Djibril Sidibe, Thomas Lemar dan berbagai pemain asing lainnya yang berasal dari Benua Afrika.[7] Melalui program tersebut, Prancis berhasil menjuarai final Piala Dunia 2018 bersama tim yang diisi oleh sebagian besar pemain naturalisasi.[8] Sementara itu, negara di Asia Tenggara seperti Singapura juga telah aktif melakukan naturalisasi terhadap pemain asing sejak tahun 2004. Hasilnya, Singapura telah menjuarai Association of Southeast Asian Nations Football Federation Championship (AFF CUP) sebanyak 3 (tiga) kali.[9]

---

[7] Muhammad, Zulhidayat, *et al,* "*Political Law of The Government in A Special Naturalization of Indonesian Football Players Based on Welfare State Theory*", Eduvest-Journal of Universal Studies 2, No. 4, 2022, hlm. 622–629.
[8] *Ibid.*
[9] *Ibid.*

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Yuridis Pelibatan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dalam Proses Pewarganegaraan Pemain Sepak
Bola Asing melalui Jalur Naturalisasi Istimewa dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara**
Muhammad Fathur Rizqi, Dr. Oce Madril, S.H., M.A.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Di Indonesia, program naturalisasi pemain asing bukanlah sebuah hal yang baru. Sebab, program tersebut sudah ada sejak tahun 1950-an yang mana kiper berketurunan Belanda, Arnold van Der Kin, menjadi pemain pertama yang dinaturalisasi oleh timnas Indonesia.[10] Sejak tahun 2010, Indonesia telah melakukan naturalisasi kepada 52 pemain sepak bola asing.[11] Awalnya, program sebatas ditujukan untuk memenuhi kebutuhan klub lokal sehingga bukan didasarkan kepada kepentingan nasional timnas Indonesia. Namun, di bawah kepemimpinan Erick Thohir selaku Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PPSI) periode 2023–2027, program naturalisasi menjadi lebih terarah yang mana ditujukan kepada individu yang memiliki darah yang berasal dari keturunan Indonesia.[12] Berikut, daftar pemain yang telah dinaturalisasi dari tahun 2020–2024 oleh timnas Indonesia, berdasarkan **Tabel 1.** antara lain:

TABEL 1. DAFTAR PEMAIN NATURALISASI TIM NASIONAL INDONESIA PERIODE (2020-2024)

NO	NAMA	NEGARA ASAL	TAHUN
1	Mark Klok	Belanda	2020
2	Sandy Walsh	Belanda	2020
3	Jordy Amat	Spanyol	2022
4	Shayne Pattynama	Belanda	2023

[10] Inggra, Paradanu, "Naturalisasi Pemain PSSI: Regulasi, Sejarah, dan Pro-Kontra Timnas Sepak Bola Indonesia", *https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/naturalisasi-pemain-pssi-regulasi-sejarah-dan-pro-kontra-timnas-sepakbola-indonesia*, diakses 16 Desember 2024.
[11] *Ibid.*
[12] *Ibid.*

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Analisis Yuridis Pelibatan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dalam Proses Pewarganegaraan Pemain Sepak Bola Asing melalui Jalur Naturalisasi Istimewa dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara
Muhammad Fathur Rizqi, Dr. Oce Madril, S.H., M.A.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

5	Ivar Jenner	Belanda	2023
6	Rafael Struick	Belanda	2023
7	Justin Hubner	Belanda	2023
8	Jay Idzes	Belanda	2023
9	Calvin Verdonk	Belanda	2024
10	Nathan Tjo-A-On	Belanda	2024
11	Mess Victor Hilgers	Belanda	2024
12	Eliano Johannes Rijnders	Belanda	2024
13	Maarten Vincent Paes	Belanda	2024
14	Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen	Belanda	2024
15	Kevin Diks	Belanda	2024
16	Tom Haye	Belanda	2024

Sumber: Diolah oleh Penulis

Dalam konteks kewarganegaraan di Indonesia, status kewarganegaraan merupakan hak konstitusional setiap orang sebagaimana ketentuan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa, "*Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.*" Dengan hadirnya pengakuan hak konstitusional tersebut, pemerintah kemudian mengesahkan penetapan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia bagi bangsa dan/atau individu lain yang hendak bergabung menjadi bangsa Indonesia. Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Yuridis Pelibatan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dalam Proses Pewarganegaraan Pemain Sepak
Bola Asing melalui Jalur Naturalisasi Istimewa dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara**
Muhammad Fathur Rizqi, Dr. Oce Madril, S.H., M.A.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia mengatur bahwa setiap orang yang berada dalam wilayah Republik Indonesia karena kelahiran, status perkawinan, atau karena pernyataan karena sudah berumur 18 tahun dapat menjadi WNI melalui proses pewarganegaraan.[13] Sementara itu, merujuk pada UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, diatur ketentuan bahwa penduduk Indonesia yang sudah bertempat tinggal di Indonesia sedikitnya 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun secara tidak berturut-turut, maka cukup bagi penduduk memahami tentang Indonesia dan budaya. Dengan demikian, faktor jangka waktu menetap di wilayah Republik Indonesia berkaitan erat dalam proses pewarganegaraan. Selain itu, persyaratan umur juga diperlukan, yakni umur 18 tahun yang disyaratkan cukup dewasa dalam menyatakan kewarganegaraan sebagaimana yang diatur dalam Konvensi tentang Hak Anak. Di sisi lain, faktor kesetiaan dan nasionalisme juga menjadi penting. Sebab, seseorang wajib untuk menunjukan sikap setia kepada Republik Indonesia.[14]

Lebih lanjut, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU 12/2006), pemerintah Indonesia membuka peluang terhadap individu asing untuk dapat menjadi warga negara Indonesia (WNI) melalui dua mekanisme umum dan satu mekanisme khusus, yakni, Naturalisasi Biasa (Pasal 9 UU 12/2006), Perkawinan Campur (Pasal 19 UU 12/2006), dan Naturalisasi Istimewa (Pasal 20 UU 12/2006). Dalam hal ini, jalur Naturalisasi Istimewa (Pasal 20 UU 12/2006) merupakan jalur naturalisasi khusus digunakan oleh Pemerintah dalam mendorong kewarganegaraan terhadap pemain sepak bola asing. Dengan

[13] Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan, hlm 82 – 85.
[14] *Ibid*.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Yuridis Pelibatan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dalam Proses Pewarganegaraan Pemain Sepak
Bola Asing melalui Jalur Naturalisasi Istimewa dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara**
Muhammad Fathur Rizqi, Dr. Oce Madril, S.H., M.A.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

kata lain, ketentuan ini menjadi *bypass* (langkah cepat) Pemohon dengan melewati syarat administratif yang diwajibkan dalam Naturalisasi Biasa (Pasal 9 UU 12/2006) dan Perkawinan Campur (Pasal 19 UU 12/2006). Meskipun demikian, jalur Naturalisasi Istimewa (Pasal 20 UU 12/2006) memiliki keunikan dibandingkan dua jalur lainnya. Sebab, pada jalur Naturalisasi Istimewa (Pasal 20 UU 12/2006), proses tersebut melibatkan peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai salah satu unsur yang memberikan rekomendasi terhadap permohonan kewarganegaraan. Sementara itu, Naturalisasi Biasa (Pasal 9 UU 12/2006) dan Perkawinan Campur (Pasal 19 UU 12/2006) tidak melibatkan unsur DPR pada proses permohonan administratifnya. Merujuk pada Pasal 20 UU 12/2006 dijelaskan bahwa, "*Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh* ***Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia****, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.*"

Melalui ketentuan tersebut dapat dianalisis beberapa unsur, yakni **Pertama**, subjek yang dimohonkan kewarganegaraan tersebut haruslah orang asing dan/atau orang yang berasal dari negara asing. **Kedua**, seseorang tersebut harus memenuhi syarat bahwa telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara. **Ketiga**. diberikan oleh lembaga yang spesifik, yakni Presiden Republik Indonesia (mengeluarkan Keputusan Presiden/Keppres). **Keempat**, pemberian keputusan tersebut diberikan berdasarkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). **Kelima**, pemberian

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Yuridis Pelibatan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dalam Proses Pewarganegaraan Pemain Sepak
Bola Asing melalui Jalur Naturalisasi Istimewa dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara**
Muhammad Fathur Rizqi, Dr. Oce Madril, S.H., M.A.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

kewarganegaraan tersebut tidak boleh mengakibatkan yang bersangkutan (WNA) tersebut menjadi berkewarganegaraan ganda.

Melalui ketentuan tersebut, pertimbangan DPR terhadap proses pewarganegaraan pemain sepak bola asing menjadi suatu syarat yang wajib dilaksanakan apabila Pemohon hendak menggunakan jalur Naturalisasi Istimewa (Pasal 20 UU 12/2006). Dalam hal ini, Penulis menganggap penting untuk meninjau keterlibatan DPR dalam proses pewarganegaraan melalui Jalur Naturalisasi Istimewa (Pasal 20 UU 12/2006) dalam kerangka Hukum Administrasi Negara. Hal ini menjadi penting mengingat bahwa keputusan dari hasil pewarganegaraan tersebut merupakan Keputusan Presiden (Keppres) yang merupakan bagian dari *beschikking* atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Selain itu, Penelitian ini penting untuk meninjau kedudukan DPR dalam proses penerbitan KTUN dalam rangka pengawasan sebagaimana prinsip penanggulangan pada sumber (*abatement at the source principle*). Di sisi lain, proses keterlibatan DPR juga berdampak terhadap formulasi kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan pelaksanaan kebijakan naturalisasi oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Dengan demikian, Penulis hendak menguraikan lebih lanjut terkait dengan ketentuan bagaimana keterlibatan DPR terhadap proses pewarganegaraan pemain asing dalam perspektif Hukum Administrasi Negara dan implikasi pengawasan DPR dalam proses pewarganegaraan pemain sepak bola asing melalui jalur naturalisasi istimewa terhadap Presiden, Kemenpora, dan PSSI.

Analisis Yuridis Pelibatan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dalam Proses Pewarganegaraan Pemain Sepak
Bola Asing melalui Jalur Naturalisasi Istimewa dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara
Muhammad Fathur Rizqi, Dr. Oce Madril, S.H., M.A.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

1.2 Rumusan Masalah

a. Bagaimana Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Proses Pewarganegaraan Pemain Sepak Bola Asing Melalui Jalur Naturalisasi Istimewa Ditinjau dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara?

b. Bagaimana Implikasi Pengawasan DPR dalam Proses Pewarganegaraan melalui Jalur Naturalisasi Istimewa Terhadap Presiden, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Melalui dua rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka Penelitian ini disusun dan ditujukan untuk dua tujuan, yakni:

1. **Tujuan Objektif**
    a. Meninjau dan menganalisis keterlibatan DPR dalam proses pewarganegaraan naturalisasi istimewa dalam perspektif Hukum Administrasi Negara. ;
    b. Mengidentifikasi dan menganalisis implikasi hukum keterlibatan dan pengawasan DPR dalam proses kewarganegaraan melalui jalur Naturalisasi Istimewa (Pasal 20 UU 12/2006) terhadap penerbitan Keputusan Presiden, kebijakan naturalisasi oleh Kemenpora, dan pelaksanaanya oleh PSSI.

2. **Tujuan Subjektif**
    a. Tujuan subjektif penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tugas akhir penulisan hukum sebagai syarat

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Yuridis Pelibatan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dalam Proses Pewarganegaraan Pemain Sepak
Bola Asing melalui Jalur Naturalisasi Istimewa dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara**
Muhammad Fathur Rizqi, Dr. Oce Madril, S.H., M.A.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

untuk memenuhi kelulusan pada Program Sarjana ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, Penulis mencoba menguraikan mengenai dua manfaat utama terkait penelitian ini, yakni:

1. **Manfaat Teoritis**
   a. Bahwa penelitian ini akan dapat menjadi sarana bagi Peneliti untuk memahami aspek-aspek ilmu hukum terutama dalam kerangka hukum administrasi negara yang berkaitan dengan proses pewarganegaraan pemain sepak bola asing di Indonesia.
2. **Manfaat Praktis**

   bahwa penelitian ini akan menjadi sarana bagi Penulis untuk memberikan sumbangan pemikiran dan konsep baru berkorelasi dengan peningkatan hukum administrasi negara, terutama terhadap aspek kewarganegaraan (*citizenship*). Sementara itu manfaat lain yang dapat diambil dari penulisan ini adalah:

   a. Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik: Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kualitas kebijakan publik di Indonesia agar lebih demokratis, terbuka, dan sesuai dengan ketentuan umum kebijakan publik Indonesia terhadap seluruh warga negara Indonesia. Melalui langkah pengawasan terhadap ketentuan pewarganegaraan, dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap

Analisis Yuridis Pelibatan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dalam Proses Pewarganegaraan Pemain Sepak
Bola Asing melalui Jalur Naturalisasi Istimewa dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara
Muhammad Fathur Rizqi, Dr. Oce Madril, S.H., M.A.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

pemerintah dan menjadi preseden baik terhadap kebijakan publik selanjutnya.

b. Pengembangan kebijakan naturalisasi istimewa: Penelitian ini dapat meningkatkan pengembangan kebijakan publik dalam aspek kebijakan kewarganegaraan terutama pada aspek naturalisasi terhadap pemain sepak bola asing di indonesia. Dengan melihat perkembangan globalisasi yang tidak dapat dihindari serta banyaknya diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai negara di dunia, pemerintah dapat memanfaatkan potensi tersebut dalam upaya mendorong kepentingan nasional.

c. Peningkatan Pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM): Kebijakan kewarganegaraan, khususnya naturalisasi mendorong semangat pengakuan terhadap HAM. Bahwa kebijakan kewarganegaraan seseorang merupakan pilihan individu sehingga hadirnya Kebijakan kewarganegaraan terhadap diaspora/orang asing dapat mendorong negara untuk semakin mengakui HAM.

1.5 Keaslian Penelitian

Melalui berbagai penelusuran yang telah dilakukan oleh Penulis di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, dan berbagai macam media, seperti jurnal, internet, dan media massa, Penulisan Hukum yang berjudul "**ANALISIS YURIDIS PELIBATAN LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PROSES PEWARGANEGARAAN PEMAIN SEPAK BOLA ASING MELALUI JALUR NATURALISASI ISTIMEWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM**

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Yuridis Pelibatan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dalam Proses Pewarganegaraan Pemain Sepak
Bola Asing melalui Jalur Naturalisasi Istimewa dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara**
Muhammad Fathur Rizqi, Dr. Oce Madril, S.H., M.A.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ADMINISTRASI NEGARA" belum pernah terdaftar, dipakai, ataupun digunakan sama sekali di berbagai Penulisan Hukum. Meskipun demikian, Penulis menemukan beberapa penelitian (skripsi) yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Beberapa penelitian tersebut antara lain, yakni:

1. Skripsi oleh Rhendy Tegar Hidayatullah, 2020, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Jember, diunggah 2021 dan berjudul, "Status Kewarganegaraan Bagi Atlet Sepak Bola yang Melakukan Naturalisasi Berdasarkan Peraturan Kewarganegaraan Indonesia." Penelitian tersebut menguraikan mengenai langkah dalam memperoleh kewarganegaraan di Indonesia. Lebih lanjut, Penelitian tersebut membandingkan cara memperoleh status kewarganegaraan terhadap atlet sepak bola asing dan warga negara asing biasa serta bentuk perlindungan hukum terhadap orang yang telah dinaturalisasi berdasarkan ketentuan dalam UU 12/2006. Sementara itu, penelitian yang dilakukan Penulis berfokus terhadap keterlibatan dan pengawasan DPR dalam proses pewarganegaraan dan implikasinya terhadap Presiden, Kemenpora, dan PSSI.
2. Skripsi oleh Fery Romadhon, 2024, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya, diunggah pada tahun 2024 dan berjudul, "Naturalisasi Pemain Sepak Bola berdasarkan Peraturan Kewarganegaraan Indonesia". Penelitian tersebut mengkaji mengenai bagaimana ketentuan mengenai penggunaan pemain sepak bola asing pada klub lokal di indonesia serta ketentuan mengenai pemberian kewarganegaraan terhadap pemain sepak bola asing melalui jalur naturalisasi. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Yuridis Pelibatan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dalam Proses Pewarganegaraan Pemain Sepak
Bola Asing melalui Jalur Naturalisasi Istimewa dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara**
Muhammad Fathur Rizqi, Dr. Oce Madril, S.H., M.A.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Penulis ditujukan untuk mengkaji proses pengimplementasian pewarganegaraan terhadap pemain sepak bola asing dan pelibatan DPR dalam memberikan pertimbangan sebagaimana pasal 20 UU 12/2006. Lebih lanjut, dalam Penelitian yang dilakukan oleh Penulis akan berfokus secara mendalam terhadap keterlibatan DPR dalam proses pewarganegaraan dan implikasi pengawasan DPR terhadap Presiden, Kemenpora, dan PSSI.

3. Skripsi oleh Manggala Widi Adianto, 2019, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, diunggah pada tahun 2019 dan berjudul, "Legalitas Atlet Sepak Bola Naturalisasi dalam Mewakili Indonesia di Kompetisi Internasional." Penelitian tersebut mengkaji mengenai legalitas atlet sepak bola yang telah dinaturalisasi berdasarkan hukum positif di Indonesia dalam hal berkompetisi dalam kejuaraan internasional. Lebih lanjut, penelitian tersebut mengkaji lebih lanjut mengenai kewenangan untuk menentukan legalitas atlet sepak bola berdasarkan peraturan FIFA. Di sisi lain, Penelitian yang dilakukan oleh Penulis ditujukan untuk menganalisis pelibatan DPR dalam proses pengimplementasian pewarganegaraan pemain sepak bola asing dalam perspektif Hukum Administrasi Negara. Dengan demikian, secara pembahasan dan hasil kesimpulan akan memberikan hasil yang berbeda.
4. Skripsi oleh Ilham Pratama, 2022, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pakuan, diunggah pada tahun 2022, dan berjudul, "Tinjauan Terhadap Proses Naturalisasi Pemain Sepak Bola Warga Negara Asing Menjadi Warga Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Dan Pasal 3 Dan 5 Statuta FIFA."

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Yuridis Pelibatan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dalam Proses Pewarganegaraan Pemain Sepak
Bola Asing melalui Jalur Naturalisasi Istimewa dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara**
Muhammad Fathur Rizqi, Dr. Oce Madril, S.H., M.A.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Penelitian tersebut menguraikan mengenai proses pengaturan naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia dan aturan FIFA yang mengatur mengenai ketentuan naturalisasi. Lebih lanjut, penelitian tersebut membahas mengenai dampak ketentuan tersebut terhadap pemain yang dinaturalisasi. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Penulis lebih membahas mengenai proses pewarganegaraan khususnya pada aspek keterlibatan DPR dalam pewarganegaraan melalui jalur Naturalisasi Istimewa.